

2025



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



**Laporan Triwulan I Pengelolaan Risiko
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar Tahun 2025**

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Pengelolaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah merupakan Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025.

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 76 risiko (polulasi risiko), yang terdiri dari 9 risiko strategis OPD, 23 risiko operasional OPD dan 44 risiko fraud dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 76 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 risiko (5,26% dari 76 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 4 risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas).
- c. Sebanyak 4 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 4 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan I sebanyak 3 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 3 kegiatan atau 100% dari 3 kegiatan pengendalian pada Triwulan I. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah pada Triwulan I.

BAB IV

Monitoring Risiko dan RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada triwulan I. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

BAB V

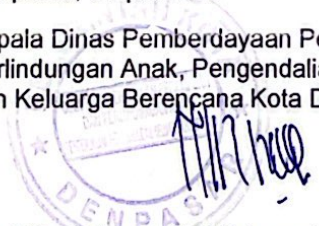
Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Triwulan I dapat dilihat bahwa tidak terdapat risiko yang muncul pada Triwulan I.

Analisis manajemen risiko harus dilaksanakan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Denpasar, 8 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,


Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311199503 2 001

LAMPIRAN

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang
Urusan Pemerintahan	: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD				
1	Tidak tercapainya pemenuhan data untuk penilaian APE	RSO.25.08.13.01	3	2	6
2	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.25.08.13.02	2	1	2
3	Pendampingan puspaga desa /lurah belum terlaksana dengan maksimal	RSO.25.08.13.03	2	4	8
4	Kurang maksimalnya hasil Buku Profil Statistik Gender	RSO.25.08.13.04	4	3	12
5	Tidak tercapainya indikator Kota Layak Anak	RSO.25.08.13.05	2	1	2
6	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.25.08.13.06	2	1	2
7	Penyediaan data tidak terpenuhi	RSO.25.14.13.07	2	1	2
8	Target program tidak dapat tercapai	RSO.25.14.13.08	2	3	6
9	Terjadinya pergantian kader pada Tahun Anggaran berjalan	RSO.25.14.13.09	4	2	8
II	Risiko Operasional OPD				
1	Keterlambatan pengumpulan Dokumen Penganggaran Berbasis Gender	ROO.25.08.13.01	2	3	6
2	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	5	3	15
3	Peserta yang ditugaskan hadir dalam kegiatan adalah orang yang sudah pernah ditugaskan sebelumnya	ROO.25.08.13.03	2	1	2
4	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	5	3	15
5	keterbatasan peserta yang dapat diberikan pelatihan	ROO.25.08.13.05	2	1	2
6	Peserta yang hadir lebih banyak adalah orang yang sama dengan peserta yang hadir pada tahun sebelumnya	ROO.25.08.13.06	2	1	2
7	Peserta yang hadir lebih banyak perempuan	ROO.25.08.13.07	2	1	2
8	Keterlambatan pengumpulan data statistik gender	ROO.25.08.13.08	4	3	12
9	Kehadiran peserta tidak sesuai dengan kuota peserta	ROO.25.08.13.09	2	4	8
10	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.25.08.13.10	2	4	8
11	Keterbatasan kuota pemberian edukasi kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP	ROO.25.08.13.11	2	1	2
12	keterbatasan peserta yang dapat diberikan pelatihan	ROO.25.08.13.12	2	1	2
13	Keterlambatan pembayaran honor pihak penerima operasional	ROO.25.14.13.13	3	3	9
14	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu/ tidak sesuai dengan kalender kegiatan	ROO.25.14.13.14	2	1	2
15	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	ROO.25.14.13.15	4	3	12

16	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	5	3	15
17	Pelaporan Kegiatan yang tidak tepat waktu	ROO.25.14.13.17	2	1	2
18	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.08.13.18	2	1	2
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.25.08.13.19	2	1	2
20	Serapan anggaran tidak optimal	ROO.25.08.13.20	2	1	2
21	Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali	ROO.25.08.13.21	3	1	3
22	Spesifikasi barang pada e katalog tidak sesuai dengan DPA	ROO.25.08.13.22	2	3	6
23	Terdapat selisih hasil pengukuran pemeliharaan gedung dan bangunan dengan RAB	ROO.25.08.13.23	3	3	9
III	Risiko Fraud OPD				
1	Dokumen rencana anggaran tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.25.08.13.01	2	1	2
2	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.02	2	1	2
3	Pejabat menyusun anggaran belum mengacu pada data dan kebutuhan	RF.25.08.13.03	2	1	2
4	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.04	2	1	2
5	Pejabat menyusun anggaran belum mengacu pada data dan kebutuhan	RF.25.08.13.05			
6	Pejabat menyusun anggaran belum mengacu pada data dan kebutuhan	RF.25.08.13.06	2	1	2
7	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.07	2	1	2
8	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.08	2	1	2
9	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.09	2	1	2
10	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.10	2	1	2
11	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.11	2	1	2
12	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.12	2	1	2
13	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.13	2	1	2
14	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.14	2	1	2
15	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.15	2	1	2
16	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.16	2	1	2
17	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.17	2	1	2
18	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.18	2	1	2

19	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.19	2	1	2
20	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.20	2	1	2
21	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.21	2	1	2
22	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.22	2	1	2
23	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.23	2	1	2
24	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.24	2	1	2
25	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.25	2	1	2
26	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.26	2	1	2
27	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.27	2	1	2
28	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.28	2	1	2
29	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	5	3	15
30	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.30	2	1	2
31	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.31	2	1	2
32	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.32	2	1	2
33	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.14.13.33	2	1	2
34	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.14.13.34	2	1	2
35	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan	RF.25.08.13.35	2	1	2
36	Gratifikasi dalam proses kenaikan gaji berkala	RF.25.08.13.36	2	1	2
37	Dokumen perencanaan pemilihan penyedia berdasarkan kedekatan/mengutamakan kepentingan kelompok/golongan	RF.25.08.13.37	2	1	2
38	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.38	2	1	2
39	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.08.13.39	3	3	9
40	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.40	2	1	2
41	Dokumen belanja tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.25.08.13.41	2	1	2
42	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.42	2	1	2

43	Dokumen belanja pemeliharaan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya	RF.25.08.13.43	2	1	2
44	Pejabat berwenang memberi bukti-bukti yang sudah direkayasa sebagai bentuk pertanggung jawaban	RF.25.08.13.44	2	1	2

Denpasar, 8 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. SI

Pembina Utama Muda

NIP : 19660311 199503 2 001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025				
Tujuan Strategis		: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
	-					
II	Risiko Strategis OPD					
	-					
III	Risiko Operasional OPD					
1	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	15	Kabid KHPKKDI	Kurangnya pengawasan	1. Temuan dan Pengembalian dana
2	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	15	Kepala UPTD PPA	1. Kurangnya pengawasan, 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi/ golongan	1. Timbulnya praktik korupsi dan kolusi 2. Menimbulkan kerugian keuangan negara
3	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	15	Kabid KBKKK	1. Keterlambatan pembuatan SK; 2. SK tidak berlaku surut	Kelebihan pembayaran honorarium
IV	Risiko Fraud OPD					
1	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	15	Sekda, UKPBJ, DP3AP2KB, Inspektorat	Masih perlunya peningkatan koordinasi bersama asosiasi usaha sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang berdampak pada ketertarikan pelaku usaha untuk mendaftar sebagai calon penyedia pada etalase katalog lokal	Adanya potensi gratifikasi dalam pengadaan

Denpasar, 8 April 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
	-						
II	Risiko Strategis OPD						
	-						
III	Risiko Operasional OPD						
1	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	Penyesuaian RKA melalui Desk RKA	Pengawasan pencairan dana oleh Kasubag Keuangan	Koordinasi bidang terkait dengan Kasubag Keuangan	Kabid KHPKDI	TW II
2	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	Pemasangan CCTV pada Ruang Layanan UPTD	Penguatan Pengawasan melalui perbaikan Standar Pelayanan Publik dan Pemantauan CCTV di Ruang Layanan	Perbaikan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik, Pemantauan CCTV	Kepala Dinas, Ka UPTD PPA	TW I-IV
3	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan	ROO.25.14.13.16	Pembuatan SK oleh pelaksana teknis	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Kabid KBKKK	TW I
IV	Risiko Fraud OPD						
1	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	Penetapan spesifikasi teknis sesuai juknis dari kementerian	Koordinasi dengan Bagian PBj dan inspektorat	Koordinasi dengan Bagian PBj dan inspektorat	Kepala Dinas, Kabid KBKKK	TW I

Denpasar, 8 April 2025
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar

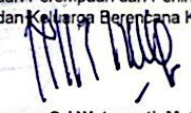
Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Koordinasi bidang terkait dengan Kasubag Keuangan	Koordinasi	Kasubag Keuangan	Bidang KHPKDI	TW II	-	-
2	Perbaikan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik, Pemantauan CCTV	Rapat dan pengawasan	Penerima Layanan	DP3AP2KB	TW I-IV	21 Januari 2025	Perbaikan standar pelayanan melalui FKP pada 21 Januari 2025, Pemasangan CCTV sudah dipasang dari awal tahun.
3	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Koordinasi	Bagian Hukum	DP3AP2KB	TW I	2 Januari 2025	Penetapan SK pada tanggal 2 Januari 2025
4	Koordinasi dengan Bagian PBj dan inspektorat	Koordinasi	Bagian PBj	DP3AP2KB	TW I	11 Februari 2025	Laporan terlampir

Denpasar, 8 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Koordinasi bidang terkait dengan Kasubag Keuangan	Monev	Kepala Dinas	TW III	-	-
2	Perbaikan Standar Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik, Pemantauan CCTV	Rapat	Kepala Dinas	TW II-IV	21 Januari 2025	Telah dilaksanakan
3	Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait Pembuatan SK	Rapat	Kepala Dinas	TW I	2 Januari 2025	Telah dilaksanakan
4	Koordinasi dengan Bagian PBj dan inspektorat	Rapat	Kepala Dinas	TW I	11 Februari 2025	Telah dilaksanakan

Denpasar, 8 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota, Denpasar

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

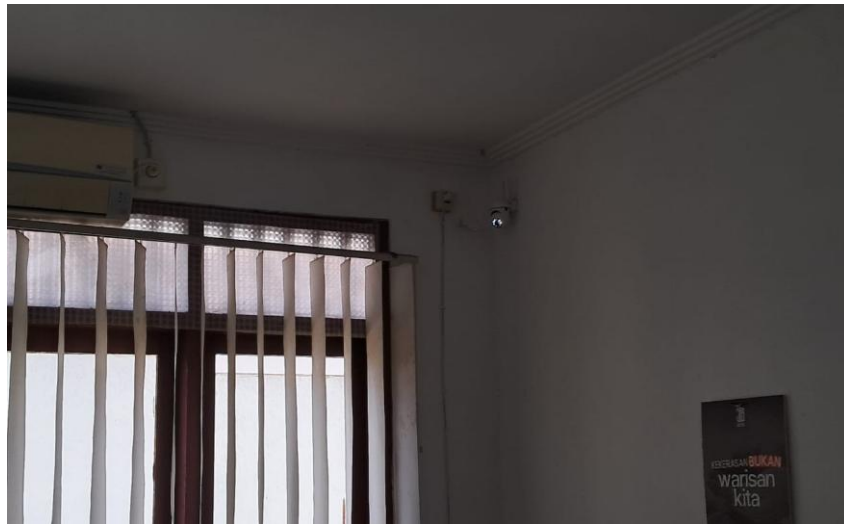
Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang

Urusan Pemerintahan : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

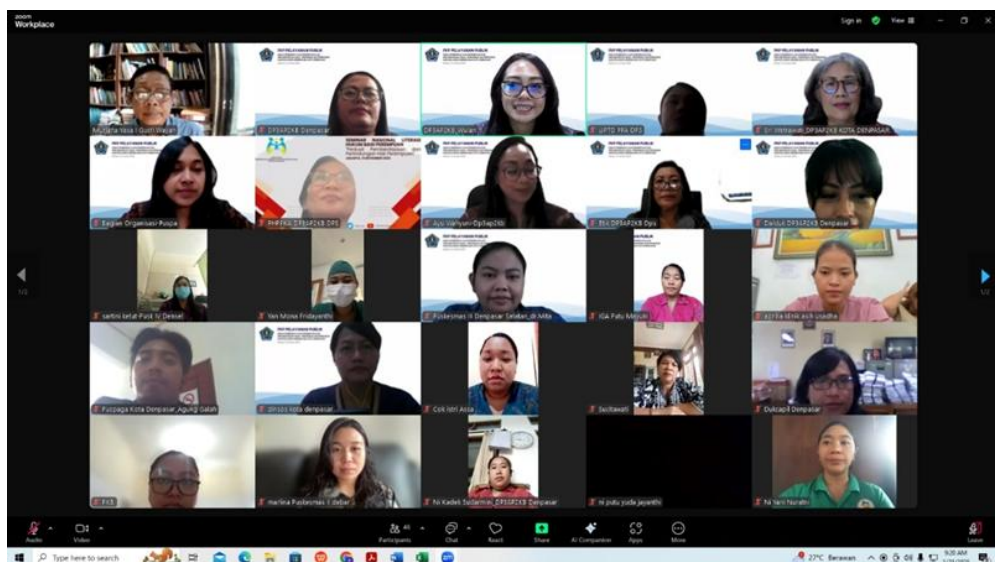
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
	Nihil									
II	Risiko Strategis OPD									
1										
	Nihil									
III	Risiko Operasional OPD									
1	Pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	ROO.25.08.13.02	-							
2	Terdapat potensi benturan kepentingan yaitu pemberi layanan menawarkan jasa konsultasi psikologi/ hukum di luar institusi resmi	ROO.25.08.13.04	-							
3	Pembayaran honorarium BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan SK yang berlaku	ROO.25.14.13.16	-							
4	Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek	RF.25.14.13.29	-							
	Nihil									

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Dokumentasi Pemasangan CCTV:



Dokumentasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Perbaikan Standar Pelayanan Publik :





BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

Pada hari ini, **Selasa**, Tanggal **Dua Puluh Satu**, Bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, telah dilaksanakan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:



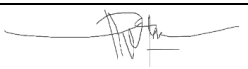



1. Terdapat perbaikan struktur organisasi menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru
2. Terdapat perbaikan mekanisme prosedur layanan menyesuaikan dengan metode terbaru

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	Perbaikan pengaduan Nayaka Prana melalui Hotline Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dan Whatsapp SAPA 08111129129. Perbaikan tahapan pelaksanaan Layanan PPRG menggunakan perhitungan anggaran berbasis gender (GAP & GAB)	
2.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui web dinas pengaduan.dp3ap2kb@gmail.com , instagram @dinas_p3ap2kb, telepon (0361) 428380	Email terpisah dengan email dinas

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 21 Januari 2025

No	Nama	L/P	Perwakilan	Tanda tangan
1	Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE., MSi	L	Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	
2	Dr.dr.IGede Budiarta SpAnKMN	L	Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	
3	Ni Made Puspa Krisnawati	P	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	
4	I Gusti Ketut Sudiatmika S.Sos.,MAP	L	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
5	A A Ayu Diah Kurniawati,S.Pt, M.Si	P	Dinas Sosial Kota Denpasar	
6	dr. I Gusti Agung Ayu Decy Partiw	P	Ketua APSAI	

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196603111995032001



Kepada Yth : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
Dari : Kabid KBKKK pada DP3AP2KB Kota Denpasar
Perihal : Laporan Kegiatan Persentasi Produk laparascopy
Tanggal : Selasa/11 Februari 2025
Tempat : RSU Prima Medika

I. Pendahuluan

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu strategi penting dalam program Keluarga Berencana (KB) nasional untuk menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat. Salah satu jenis MKJP yang efektif dan semakin diminati adalah metode kontrasepsi mantap (kontap) melalui tindakan laparoscopi.

Laparoscopi sebagai teknik bedah minimal invasif menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan bedah konvensional, seperti luka sayatan yang lebih kecil, nyeri pasca operasi yang minimal, waktu pemulihan yang lebih singkat, dan risiko infeksi yang lebih rendah. Hal ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk tindakan kontap, yang bertujuan untuk memberikan solusi kontrasepsi yang aman, efektif, dan nyaman bagi perempuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target program MKJP dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kontap berkualitas di Kota Denpasar, pengadaan peralatan laparoscopi menjadi suatu kebutuhan mendesak. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pengadaan peralatan laparoscopi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan MKJP.

II. Latar Belakang

1. **Pentingnya MKJP:** MKJP, termasuk kontap, memainkan peran krusial dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan reproduksi.
2. **Keunggulan Laparoscopi:** Teknik bedah minimal invasif ini menawarkan berbagai keuntungan bagi pasien dan tenaga medis.
3. **Kebutuhan Peralatan:** Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kontap, pengadaan peralatan laparoscopi yang memadai sangat diperlukan.

III. Tujuan Laporan

Mendokumentasikan proses pengadaan peralatan laparoskopi secara transparan dan akuntabel. Mengevaluasi efektivitas pengadaan dalam mendukung kegiatan MKJP serta Memberikan rekomendasi untuk proses pengadaan di masa mendatang sesuai aturan yang berlaku.

IV. Hasil Kegiatan

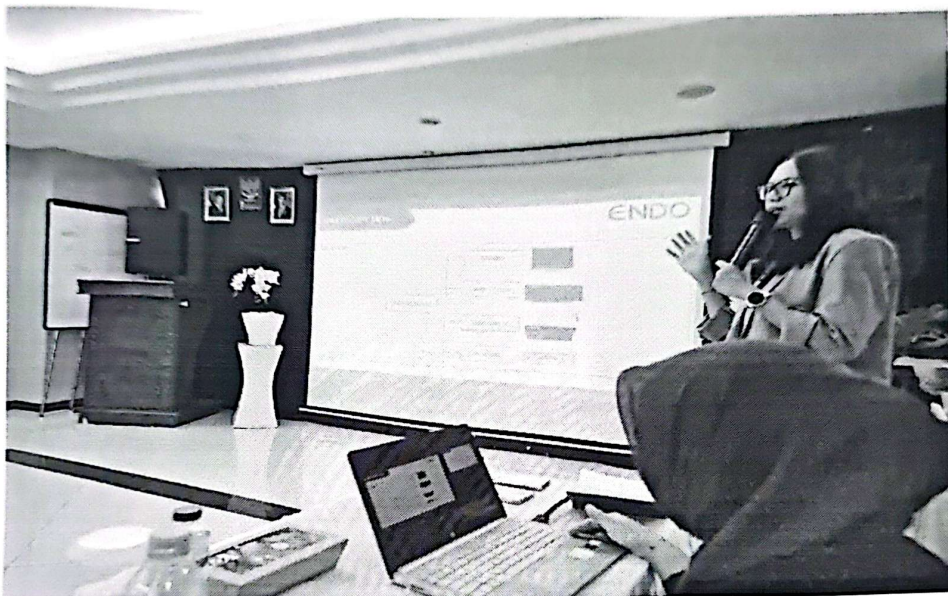
Kegiatan persentasi alat laparoscopy dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 yang diadakan di ruang orchid RSU Prima Medika Denpasar. Pada kesempatan kali ini acara dibuka oleh plt Sekretaris sekaligus PPTK kegiatan pengadaan Laparoscopy Dinas P3AP2KB Kota Denpasar dan dihadiri oleh Direktur RSU prima Medika, PPK Dinas P3AP2KB Kota Denpasar, Inspektorat kota Denpasar, BPKAD kota Denpasar, Dokter Penanggung jawab medis tubektomi dan jajaran manajemen RSU Prima Medika.

Pemaparan pertama dibawakan oleh PT Endo Indonesia, barang yang ditawarkan adalah set laparoscopy MOW dengan monitor dengan merk ENDO dengan jenis produk PDN yang memiliki nilai TKDN 42,98% dan nilai BMP sebesar 8.25.

Pemaparan kedua dibawakan oleh PT Alesha Berkah Utama, barang yang ditawarkan adalah set laparoscopy MOW dengan merk Gerlink dengan jenis produk PDN yang memiliki TKDN 44,90 % dan nilai BMP sebesar 3. Untuk proses pengadaan laparoscopy tentunya dengan berlandaskan juknis DAK BOKB Fisik yang berlaku.

Dokumentasi





V. Penutup

Demikian laporan kegiatan persentasi alat laparoscopy ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PPTK

Made Ayu Wahyuni, SE. M. Si
NIP. 197008211995032003